

**PENGARUH MODAL SOSIAL KEKERABATAN SEBAGAI STRATEGI  
DEFENSIF TERHADAP PEMENANGAN DARWATI A. GANI PADA  
PEMILU 2019**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**CUT ROZA NOVIANITA**

**NIM. 170801087**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik**

**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH MODAL SOSIAL KEKERABATAN SEBAGAI STRATEGI  
DEFENSIF TERHADAP PEMENANGAN DARWATI A. GANI PADA  
PEMILU 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Lulus Strata Satu  
(S1)  
Pada Program Studi Ilmu Politik

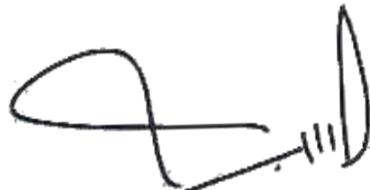
Oleh:

Cut Roza Nevisnita  
NIM. 170801087

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Disetujui untuk diuji/munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA.  
NIP. 1973092120000032004

Pembimbing II



Melly Masny, M.P.E.  
NIP. 199305242020122016

**PENGARUH MODAL SOSIAL KEKERABATAN SEBAGAI STRATEGI  
DEFENSIF TERHADAP PEMENANGAN DARWATI A. GANI PADA  
PEMILU 2019**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

: Rabu 26 Juli 2022 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

  
Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA.  
NIP. 1973092120000032004

Sekretaris

  
Melly Mashy, M.I.R.  
NIP. 199305242020122016

Penguji I

  
Rizkika Lhena Darwin, M.A.  
NIP. 198812072018032001

Penguji II

  
Danil Akbar Taqwadin, BIAM., M.Sc.  
NIDN. 2008048903

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Dr. Eknid Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Roza Novianita  
NIM : 170801087  
Program Studi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pengaruh Modal Sosial Terhadap Strategi Politik Dalam Pemenangan Darwati A Gani.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Aceh, 18 Juli 2022

Yang Menyatakan;



**Cut Roza Novianita**

**NIM: 170801087**

## Abstrak

Diskusi mengenai perempuan dan politik kini mulai banyak dibicarakan di forum-forum public. Hal dikarenakan meningkatnya kesadaran bahwa perempuan perlu terlibat dalam dunia politik juga. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja modal sosial yang dimiliki serta strategi politik yang dilakukan dalam pemenangan Darwati A Gani. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Modal sosial yang digunakan oleh Darwati A Gani meliputi relasi keluarga, relasi sosial komunitas, dan relasi dengan masyarakat yang telah berhasil mengantarkannya sebagai anggota legislatif perempuan periode 2019-2024. Sementara itu, Darwati A Gani pun menggunakan strategi defensif untuk mempertahankan pemilih tetapnya serta strategi ofensif dalam rangka menjaring pemilih-pemilih baru.

*Key Word: Politik Perempuan, Darwati A Gani, Modal Sosial, Strategi Defensif, Strategi Ofensif.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **Pengaruh Modal Sosial Kekerabatan Sebagai Strategi Defensif Terhadap Pemenangan Darwati A. Gani Pada Pemilu 2019**. Penelitian ini disusun untuk memenuhi Syarat kelulusan pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan tulus ikhlas Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Ibu/bapak selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini, serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan partisipasinya baik dalam bentuk moril maupun materil untuk keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti selaku penyusun berharap semoga karya ilmiah ini berdaya guna dan manfaatnya terutama bagi peneliti sendiri dan juga untuk para pembaca. Amin.

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Penulis,

Cut Roza Novianita

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Penelitian yang Relevan .....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Strategi Politik .....	12
2.2.2 Teori Modal Sosial .....	20
2.2.3 Teori Afiriasi Action .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Focus Penelitian.....	26
3.3 Lokasi Penelitian .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.5 Informan Penelitian .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7 Teknik Pengolahan Data Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum .....	32
4.1.1 Profil Kota Banda Aceh.....	34
4.1.2 Profil Darwati A Gani.....	36
4.2 Strategi Politik dalam Pemenangan Darwati A Gani .....	38
4.2.1 Relasi Keluarga.....	42
4.2.2 Relasi Sosial Komunitas .....	44
4.2.3 Relasi dengan Masyarakat .....	44
4.3 Strategi Politik dalam Pemenangan Darwati A Gani .....	47
4.3.1 Strategi Ofensif Darwati A Gani .....	47
4.3.3 Strategi Defensif Darwati A Gani .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Diskusi mengenai perempuan dan politik kini mulai banyak dibicarakan di forum forum publik dikarenakan meningkatnya kesadaran bahwa perempuan perlu terlibat dalam dunia politik juga. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perempuan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan khusus tersebut di antaranya meliputi pelayanan kesehatan pada alat reproduksi yang tidak dialami oleh laki-laki, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang terkait dengan perempuan.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 34/180 pada tanggal 18 Desember 1979. Di samping itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, partai politik diamanatkan untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon legislatif dari masing-masing partai politik. Kemudian dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diamanatkan pula bahwa partai politik perlu melibatkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun pengurusan di tingkat pusat. Pada ayat 2 undang-undang yang sama, diatur pula mengenai penerapan *zipper sistem* yaitu bahwa dalam setiap 3 orang bakal calon legislatif, minimal harus terdapat 1 bakal calon legislatif berjenis kelamin perempuan.

Berbagai regulasi yang telah dibuat tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya keterwakilan serta peran dan posisi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. Namun demikian, pada prakteknya kerap kali perempuan dijadikan hanya sebagai objek untuk menggalang suara dalam setiap pemilihan umum, sebagaimana Herita Dewi mengungkapkan bahwa posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik tetap saja rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi politik.<sup>1</sup>

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.<sup>2</sup> Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Herita Dewi 2016. Skripsi dengan judul *“Perempuan dan Politik dalam Perspektif Gender”*, Sumatera Barat

<sup>2</sup> Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPR RI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010. Diakses 12 April 2022

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) di akses 12 April, 2022

Aturan tersebut pula yang menjadi landasan hukum awal terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan data di lapangan, memang benar terjadi peningkatan secara kuantitas mengenai jumlah wanita yang berpartisipasi dalam dunia politik.

Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu gender dalam proses perumusan kebijakan publik. Terciptanya regulasi tersebut dianggap sebagai salah satu buah perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Kebijakan kuota 30% ini telah memberi semangat kepada perempuan untuk terjun secara langsung ke dalam dunia politik dikarenakan adanya pengakuan akan pentingnya peran mereka dalam ranah tersebut. Kebijakan tersebut juga telah membantu perempuan untuk ikut mengambil bagian dalam dunia politik yang selama ini telah didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi, hingga saat ini kuota perempuan yang sudah terpenuhi di Indonesia dalam dunia politik baru sebesar 20,5% dari 30% jumlah kuota yang diharapkan.

Partisipasi perempuan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, baik yang berkecimpung dalam lembaga legislatif, pemerintah, maupun dalam organisasi politik. Misalnya pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada periode 1987-1992 terdapat 50 orang perempuan anggota DPR dan 104 orang Perempuan anggota MPR. Padahal pada periode sebelumnya, jumlah mereka relatif kecil yaitu hanya sebanyak 42 orang anggota DPR perempuan dan 96 orang anggota MPR perempuan. Jumlah wanita yang terjun dalam dunia politik juga terlihat berfluktuasi.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035, dari total 270,6 juta penduduk Indonesia pada 2019, penduduk perempuannya berjumlah 132.886,3 juta dan laki-laki berjumlah 134.025,6.<sup>4</sup> Meski jumlah

populasi perempuan lebih banyak dari populasi laki-laki keterwakilan perempuan dalam parlemen belum mencapai angka 30%. Ini menandakan pemenuhan kuota partisipasi perempuan masih kurang dari yang diharapkan. Padahal seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan dalam politik semakin terus bertambah.

Oleh karena itu, terdapat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk memperjuangkan tercapainya keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen yang dimulai dari akar rumput, misalnya Solidaritas Perempuan Indonesia, yang mulai fokus pada keterwakilan perempuan dan juga proyek untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin.<sup>5</sup>

Dikutip dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* tahun 2017, pada level regional di ASEAN, dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen yakni sebesar 19,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen masih di bawah negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Laos, Vietnam, Singapura, dan Kamboja.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> BPS RI, Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), 2019 <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses 12 April 2022.

<sup>5</sup> <https://www.solidaritasperempuan.org/> diakses 7 april 2022

**6**

*IPU is the global organization of national parliaments* di akses 3 April 2022



Gambar 1:Rekap Data *Inter-Parliamentary Union (IPU)*

Peringkat pertama diduduki oleh Filipina dengan persentase sebesar 29,5 persen atau berjumlah 86 perempuan dari total 292 kursi. Di posisi kedua adalah Laos, sebesar 26,7 persen atau 41 perempuan dari 149 kursi di parlemen. Sedangkan, tempat ketiga diduduki oleh Vietnam dengan 26,7 persen perempuan dalam parlemen atau 132 kursi dari 494 total anggota parlemen.<sup>7</sup>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan rata-rata keterwakilan perempuan di dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh tertinggal. Meskipun persentase keterwakilan perempuan Indonesia masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata perwakilan perempuan di negara-negara Asia dan ASEAN yakni sebesar 19,80 persen, Indonesia masih harus mendorong lebih jauh lagi keterwakilan perempuan-perempuannya untuk dapat setara dengan rata-rata keterwakilan parlemen perempuan di dunia yang mencapai 23,6 persen.

<sup>7</sup> *IPU is the global organization of national parliaments* di akses 3 April 2022



Gambar 2 : Rekap Data *Inter-Parliamentary Union (IPU)*

Kemudian, menarik pula untuk membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen di Provinsi Aceh. Pada pemilihan Umum tahun 2019 di provinsi Aceh, terdapat 9 orang perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)<sup>8</sup>. Lebih detail mengenai anggota DPRA perempuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	NAMA	FRAKSI
1.	HJ. ASMIDAR, S.Pd	PARTAI ACEH
2.	MARTINI	PARTAI ACEH
3.	NORA IDAH NITA, SE	PARTAI DEMOKRAT
4.	HJ. SARTINA NA, SE., M.SI	PARTAI GOLKAR
5.	HJ. NURLELAWATI, S.Ag	PARTAI GOLKAR
6.	Drh. NURAINI MAIDA	PARTAI GOLKAR

<sup>8</sup> <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/fraksi-dpra> nama-nama anggota DPRA. Di akses 20 Maret 2022

7.	KARTINI IBRAHIM	PARTAI GERINDRA
8.	KARTINI IBRAHIM	PARTAI NANGGROE ACEH
9.	DARWATI A. GANI	PARTAI NANGGROE ACEH

Tabel 1: Anggota DPRA Perempuan dan Asal Partai

Di Provinsi Aceh sendiri terdapat 10 dapil pada pemilu 2014. KPU menetapkan hal tersebut dengan Surat Keputusan Nomor 93/Kpts/KPU/Tahun 2013. Dengan adanya penetapan Surat Keputusan tersebut provinsi Aceh memiliki 10 Dapil pada pemilu periode 2019-2024, dan memiliki 7 Partai Politik lokal yang telah mendaftar sebagai peserta pemilu. Salah satu kandidat yang mendaftar di Dapil 1 yaitu Darwati A Gani melalui Partai PNA (Partai Nanggroe Aceh). Darwati A Gani mendapat kemenangan sebagai anggota DPRA Dapil 1 (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang) dengan perolehan 6.758 suara, dan telah dilantik pada tanggal 30 September 2019 dan telah sah menjabat sebagai anggota DPRA<sup>1</sup> Darwati sebelumnya pernah menjadi anggota legislatif, namun mundur ketika suaminya terpilih sebagai gubernur Aceh.

Di provinsi Aceh, mengirim perempuan ke parlemen masih menjadi suatu kesulitan baik itu mencari suara maupun menemukan perempuan yang mau terjun ke dalam dunia politik. Sebab politik kerap kali dikatakan sebagai dunia laki-laki. Hal ini tentu menjadi hal menarik ketika Darwati A Gani berhasil mendapatkan posisi di parlemen bahkan dalam 2 periode berturut-turut, di tengah sulitnya perempuan mendapatkan posisi tersebut.

Dalam studi kasus kemenangan Darwati A Gani, menarik untuk melihat faktor

---

<sup>1</sup> Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman. Tentang *Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.Hlm:41

apa yang mendasari kemenangan politik legislatif perempuan ini. Berdasarkan permasalahan ini, menarik untuk diteliti lebih dalam mengenai PENGARUH MODAL SOSIAL KEKERABATAN SEBAGAI STRATEGI DEFENSIF TERHADAP PEMENANGAN DARWATI A. GANI PADA PEMILU 2019.

### **1.2.Rumusan Masalah**

1. Apa saja modal sosial yang dimiliki oleh Darwati A Gani sehingga mendukung kemenangan politiknya?
2. Apa saja strategi politik yang dilakukan dalam kemenangan politik Darwati A Gani?
3. Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap strategi politik yang digunakan dalam pemenangan Darwati A Gani?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja modal sosial yang dimiliki oleh Darwati A Gani sehingga mendukung kemenangan politiknya
2. Untuk mengetahui apa saja strategi politik yang dilakukan dalam kemenangan politik Darwati A Gani
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh modal sosial terhadap strategi politik yang digunakan dalam pemenangan Darwati A Gani

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya keilmuan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan

melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Pengaruh Modal Sosial Terhadap Strategi Politik Dalam Pemenangan Darwati A Gani.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi penelitian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, penelitian yang *pertama*, penelitian dilakukan oleh Ulfatun Hasanah. Yang berjudul “*GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*” penelitian ini membahas tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik karena perempuan dalam proses konstruksi sosial di masyarakat, peran perempuan bersifat domestik sehingga timbul adanya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender. Namun, perubahan kebijakan melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin dituntut untuk memasuki dunia publik karena juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai sama.

*Kedua*, penelitian dilakukan oleh Eka Yulyana. yang berjudul “*Keterlibatan Politik Perempuan dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009 – 2014*” Penelitian ini membahas tentang tentang Keterlibatan Politik Perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang serta Keterlibatan Politik Perempuan dalam proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang. Keterwakilan perempuan yang terjadi memang masih minim apabila melihat fenomena tersebut. Meskipun *affirmative action* diakui di Indonesia dengan diberlakukannya Keterwakilan perempuan yang terjadi memang masih

minim apabila melihat fenomena tersebut. Meskipun *affirmative action* diakui di Indonesia dengan diberlakukannya.

Penelitian *ketiga* dilakukan oleh Siti Nur Aini dengan judul “*Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004-2009.*” Dengan hasil Hasil penelitian yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nurhayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu faktor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah faktor sumber daya manusia yang memang sangat minim. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi hanya sebagai anggota dan hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya dimiliki oleh satu perempuan.

Dari segi peranan menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, keempat wakil perempuan ini pun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Komisi maupun DPRD. Dari deskripsi diatas dapat dipahami bahwa secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Strategi Politik**

Dalam kamus *Longman Dictionary of Contemporary English*, strategi didefinisikan sebagai perencanaan dalam mensukseskan tujuan dalam segala aktifitas, baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi maupun yang lainnya. Strategi politik seringkali digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan politik, terutama pada saat pemilihan umum.<sup>10</sup> Strategi politik yang dilakukan berkaitan dengan strategi kampanye dimana memiliki tujuan untuk memperoleh suara yang maksimal di pemilu agar memperoleh kekuasaan dan

---

<sup>10</sup> Schröder, Peter. (2009). Strategi Politik. Friedrich Naumann - Stiftung für die Freiheit. Jakarta : Salemba Empat.

pengaruh sebanyak mungkin guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat.

Strategi politik adalah sebuah rencana sistematis yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan dalam memenangkan kontes di bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan setiap momentum perebutan kekuasaan. Maka dari itu setiap partai politik yang berkompetisi pada pemilihan umum harus menyiapkan strategi politik dengan sebaik mungkin.

Dengan Strategi politik seorang kontestan dapat memenangkan pemilihan umum. Namun, hal ini hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. Lebih dalam lagi, untuk memahami mengenai strategi politik berikut ini peneliti sajikan jenis-jenis strategi yang sering digunakan dalam dunia politik seperti dalam pemilu.

*a. Strategi Ofensif*

Strategi ofensif merupakan strategi yang digunakan dalam strategi politik yang bertujuan untuk mencari pemilih baru dan memperluas pangsa pasar dalam pemilihan umum. Strategi ofensif digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, strategi yang digunakan yaitu dengan memberikan inovasi program baru yang akan memberikan keuntungan terhadap pemilih.<sup>11</sup>

- Strategi perluasan pasar digunakan dalam kampanye pemilu dan penerapan kebijakan. Dalam perluasan pasar perlu dilakukan pembaharuan produk, produk yang lama belum berhasil dijalankan dengan baik, maka

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal 45

itulah yang harus dilakukan pembaruan agar menghasilkan produk baru yang lebih baik, produk baru yang dimaksud disini adalah kebijakan baru yang dihasilkan. Bagi partai sendiri, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan:

1. Platform partai harus memiliki ciri khas sendiri.
2. Menciptakan profil baru yang dapat diterima oleh masyarakat
3. Kader partai harus menampilkan keselarasan dengan program yang dicetuskan.

Dalam melaksanakan strategi politik, perluasan pasar sangatlah penting dilakukan. Dalam strategi perluasan pasar hal yang terpenting adalah bagaimana target yang dituju mampu mengerti dengan produk yang ditawarkan dan mengetahui keuntungan-keuntungannya. Maka dari itu dalam menjalankan strategi menembus pasar, partai politik harus paham mengenai keadaan pasar itu seperti apa.

- Strategi menembus pasar merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap keadaan pemilih di daerah tersebut. Setelah mengetahui keadaan pemilih, maka dilihat juga program diberikan lawan yang sebelumnya telah berhasil dalam melakukan strategi tersebut.

*b. Strategi defensif*

Strategi defensif dilakukan apabila partai politik ingin mempertahankan mayoritasnya atau pemilih yang ingin dipertahankan.<sup>12</sup>

- Strategi mempertahankan pasar merupakan cara partai politik dalam menjaga mayoritas pemilihnya. Partai politik mempertahankan pendukung dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pemilih

musiman, agar tetap menjadi pemilih tetap pada partai politik tersebut. Partai politik dalam menjaga pemilihnya, dengan cara membuat produk berbeda dari lawannya.

- Strategi dalam melepas pasar diartikan sebagai tindakan dari partai politik yang ingin menyerah dengan keadaan. Dalam arti lain partai politik mengalami keadaan ingin berkoalisi dengan partai lain, selain itu pada pemilu yang melakukan pemungutan suara putaran kedua, biasanya hal ini diikuti oleh kandidat-kandidat yang kuat dalam pemilu putaran pertama, penyerahan pasar untuk sementara diberikan kepada pihak ketiga sering terjadi.

Berdasarkan pengertian strategi dan strategi politik dapat disimpulkan bahwa strategi pemenangan adalah upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-unsur tambahan agar berbagai strategi yang telah disusun (direncanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik. Taktik yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik.<sup>13</sup>

#### a) Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi. Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.<sup>14</sup>

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat. Dalam sebuah perencanaan karir politik, misi harus menyatakan untuk siapa

strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realistis.<sup>15</sup>

### **b) Penilaian Situasional dan Evaluasi**

Analisa situasional dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi, antara lain:<sup>16</sup>

#### **1. Pengumpulan fakta**

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan dimana akan direalisasi. Pembatasan antara faktor internal dan eksternal tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan.

---

<sup>14</sup> Schröder, Peter. (2009). Strategi Politik. Friedrich Naumann - Stiftung für die Freiheit. Jakarta : Salemba Empat.

<sup>15</sup> Schröder, Peter. (2009). Strategi Politik. Friedrich Naumann - Stiftung für die Freiheit. Jakarta : Salemba Empat.

<sup>16</sup> Schröder, Peter. (2009). Strategi Politik. Friedrich Naumann - Stiftung für die Freiheit. Jakarta : Salemba Empat.

## 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

## 3. Analisa kekuatan dan kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya mengurangi. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

## 4. Umpan balik (*feedback*)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategi yang jelas sehingga kemenangan pasti 13 dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai.

### c) Perumusan Sasaran

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju

kedepan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut: menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi:<sup>17</sup>

1. Menyusun tugas-tugas
2. Merumuskan strategi
3. Mengevaluasi strategi

**d) Target Image**

Setelah sasaran itu diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan dan kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan.

**e) Kelompok-kelompok Target**

Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategi mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

**f) Pesan Kelompok Target**

Kelompok target adalah kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu

yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis, khususnya tujuan taktis, dan melalui analisis citra yang diinginkan (target image). Apabila kelompok target telah didefinisikan pondasi untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Pondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrument-instrumen kunci.<sup>18</sup>

#### **g) Instrumen-instrumen Strategi**

Kelompok target yang telah dibahas di atas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategi yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diterima masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilik tertentu.<sup>19</sup>

#### **2.2.2 Teori Modalitas Dalam Kontestasi Politik**

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi secara procedural dan substansial dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu

sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda. Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial.

Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang 24 dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan kedalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut. Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar.

Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang

berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan menciptakan versi dunia sosial yang resmi. Pada abad ke-16 dan 17 istilah “capital” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri.

Pada waktu itu istilah “stock” dan istilah “capital” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai joint stock companies atau capital stock companies. Adam Smith dalam *the wealth of nation* dikutip Augusto Bunga, Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya dikonsumsi sebagian hanya sebagian kecil nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “fixed capital” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal dikonsumsi secara total, maka ia disebut “circulating capital” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi).

Di dalam proses Pilkada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pilkada manakala memiliki modalitas terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada langsung, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses

yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Modalitas dalam kontestasi politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pemilukada. Berikut 4 (empat) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pemilukada langsung, sebagai berikut :

a) Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan.

Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (sosial network), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (embedded) pada diri

individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :

1. Robert Putnam : modal sosial adalah suatu mutual trust antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga undesirable outcome (hasil tambahan).
2. Pierre Bourdieu, mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk social capital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial

mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

3. James Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.
4. Dari sudut pandang lain, North dan Olson menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Bahasan mengenai trust jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (social capital) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok

yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (high trust society). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (low trust society) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan ketiadaan kepercayaan (zero trust society).

Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya. Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (human capital) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

Fukuyama menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Teori modal sosial

merupakan teori yang paling tegas, dapat diringkas dalam dua kata: soal hubungan.

Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sendiri, atau dapat dicapai tetapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring menjadi sumber daya, dapat dipandang sebagai modal.

b) Modal Budaya

Modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang telah mendapat popularitas yang meluas sejak ia mulai disuarakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu dan JeanClaude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam "Cultural Reproduction dan Social Reproduction". modal budaya bertindak sebagai hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang termasuk pengetahuan budaya terkumpul yang memberikan kuasa dan status. Bourdieu menyatakan modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual.

Modal budaya merupakan pengetahuan atau selera yang bernilai secara budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya menjadi penentu kedudukan sosial seseorang karena seperti yang kita tahu, cita rasa ditentukan secara sosial. Modal budaya sendiri merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus. Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Maka, dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta

pendidikan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif.

Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- i. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
- ii. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi
- iii. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas)
- iv. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.
- v. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya. Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya.

Hal ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang mengenal yang namanya kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial tinggi lebih dihormati dan dikenal daripada individu yang memiliki status sosial rendah. Menurut Haryatmoko, para pelaku menempati posisi-posisi

masingmasing yang ditentukan oleh dua dimensi: pertama, menurut besarnya modal yang dimiliki; dan kedua,sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka.

c) Modal Politik

Kandidat dalam pemilukada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemilukada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang.

Pemilukada sebagai arena kompetisi antar kandidat. Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital) maupun modal ekonomi (economic capital).

Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (multiple forms of capital). Namun

Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (public opinion) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya. A.Hick dan J.Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-

hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangan Foucault, kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara. Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan.

Elit di dalam politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol.

Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena Pemilukada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai

melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya. Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim, dkk, Elit politik dalam konteks lokal yaitu :

“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”.

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan

pemilu.

d) Modal Ekonomi

Saat pemilu tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya. Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (financial capital).

Modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas.

Modal financial juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli. Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah “capital” dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir bad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen).

Para ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* 1890). Modal dalam konteks ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan segala kontroversinya. Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat.

Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan

tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

- i. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyetor dana sumbangan hingga miliaran rupiah.
- ii. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronik.
- iii. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang.

Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara. Sahdan dan Haboddin (2009), bahwa setiap penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu :

- i. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
- ii. Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk

peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

### 2.2.3. *Affirmative Action*

Secara historis, pemikiran tentang *affirmative action* policy pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai upaya untuk mengkompensasi diskriminasi rasial yang dialami oleh warga kulit hitam. *Affirmative action policy* pada awalnya digunakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk menginisiasi ketidakadilan masa lalu yang dialami oleh kelompok-kelompok yang terdiskriminasi. Inisiatif *affirmative action* policy dilakukan oleh Presiden Kennedy melalui penerbitan Executive Order pada bulan Mei tahun 1961.<sup>20</sup>

*Executive Order* tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat kulit hitam Amerika Serikat untuk memperoleh pekerjaan meskipun memiliki keterampilan kerja dan latar belakang pendidikan yang tidak memadai. Ada semacam perlakuan khusus yang diberlakukan bagi warga kulit hitam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk memiliki pekerjaan yang notabene pekerjaan tersebut mensyaratkan adanya jenjang pendidikan dan keterampilan yang memadai. Tindakan pengecualian ini diberikan untuk memberikan kesempatan bagi warga kulit hitam tersebut membangun peluang peningkatan kesejahteraan Sosial.<sup>21</sup>

*Affirmative action* merujuk kepada serangkaian program yang ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu untuk memperbaiki ketidak-setaraan yang mereka alami.<sup>22</sup> Munculnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk lepas dari lingkungan yang diskriminatif. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini dikemas dalam suatu kebijakan yang oleh beberapa pihak digolongkan ke dalam *indirect discrimination*. Oleh karena itu, *affirmative action* disebut juga dengan *reserve discrimination*.<sup>23</sup> *Affirmative action* juga dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu yang dianggap tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi strategis dalam masyarakat sebagai akibat dari sejarah diskriminasi.

*Affirmative action* tidak akan berdampak pada pembedaan, pengucilan, ataupun pelecehan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kebijakan ini tidaklah merupakan kebijakan diskriminatif. Hal ini ditekankan pula dalam Pasal 4 ayat (1) CEDAW atau ICEDAW<sup>24</sup> (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang menyebutkan:

*“Kebijakan khusus yang dijalankan para negara anggota yang ditujukan pada peningkatan persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan konvensi ini, tetapi dalam cara apa pun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.”*

Memahami tentang kesetaraan, ada dua konsep umum yang dikenal, yaitu kesetaraan kompetitif dan kesetaraan hasil. Kesetaraan kompetitif ditujukan untuk

---

<sup>20</sup>Sunaryo, Bambang *Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Aparatur Berbasis Merit* Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Pns Vol. 8, No.1, Juni 2014. Hal.2

menyingkirkan hambatan-hambatan yang sifatnya formal, misalnya, memberikan perempuan hak suara. Selanjutnya, tergantung perempuan bagaimana mereka ingin memanfaatkan haknya tersebut. Sementara itu, dalam konsep kesetaraan hasil, kesetaraan bukan hanya disingkirkannya hambatan-hambatan formal, tetapi ditetapkannya suatu mekanisme yang positif seperti kuota untuk mencapai hasil yang setara pula.<sup>25</sup>

Konsep kesetaraan yang kedua tersebutlah yang ingin dicapai oleh kebijakan *affirmative action* dengan sistem kuota. Pelaksanaan sistem kuota ini.<sup>26</sup> pada umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui konstitusi atau legislasi nasional dan melalui partai politik, secara sukarela.<sup>27</sup> Namun, di samping itu, terdapat pula pelaksanaan kuota dengan system *reserved seat*, yang dapat dilakukan melalui penunjukan atau pemilihan.

Konsep *affirmative action* tidak pernah bisa dipisahkan dari konsep kebijakan publik dapat dilihat bahwa dinamika perubahan perspektif konsep *affirmative action*, dari sekedar kebijakan yang berisi pengecualian persyaratan kualifikasi masyarakat yang terdiskriminasi rasial dalam memperoleh pekerjaan, menjadi konsep yang berisi akselerasi pengembangan SDM yang berkapasitas rendah dengan cara pembinaan dan pendidikan. Dinamika perubahan perspektif konsep *affirmative action* tersebut perlu diakomodir dalam kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan publik

---

<sup>22</sup> Carol Lee Bacchi, *The Politics Of Affirmative Action: Women Equality And Category Politics*, London: Sage Publications, 1996, Hal. 15.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 15.

<sup>24</sup> CEDAW adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/> diakses 11 mei 2022

telah bersifat non konvensional. Selain itu, untuk memastikan bahwa kebijakan publik telah mengakomodasi perubahan lingkungan terutama dalam keterwakilan perempuan di dunia politik.

*Affirmative action* dapat dikatakan tindakan khusus sementara berupa kebijakan, peraturan atau program khusus untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok yang termarginalkan dan dilemahkan secara politik, seperti kelompok miskin, penyandang disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok rentan perempuan. Kebijakan *affirmative action* di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms discrimination against women* atau CEDAW) melalui pengesahan UU no.7 tahun 1984 yang diberlakukan pada 24 Juli 1984.

Negara berkomitmen untuk mengikatkan diri dalam menjamin perlindungan bagi perempuan disegala sektor, diantaranya dalam bidang politik. Tetapi dalam prakteknya, kebijakan *affirmative action* ini baru menemukan momentumnya saat era reformasi dimulai, ditandai dengan terbukanya ruang yang lebih besar bagi organisasi perempuan untuk terlibat dalam proses demokratisasi berbangsa. Perjuangan gerakan perempuan kemudian berhasil mendorong wacana pentingnya kuota minimal 30% dalam ruang politik yang berdampak pada menguatnya dukungan pada kepemimpinan perempuan. Selain itu, kuota diperlukan untuk memberikan kesempatan dan peluang baik kepada kelompok tertentu agar berpartisipasi dalam proses kegiatan politik. Misalnya bagaimana partai politik memberikan metode atau tindakan khusus bagi anggota perempuan, karena minimnya jumlah perempuan dalam lembaga lembaga pengambil keputusan.

Menurut Drude Dahlrup , kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan kelompok tertentu dalam bentuk minimal prosentase, misalnya 5%, 20%, 30% atau 40%. Artinya, kebijakan affirmative action dengan sistem kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok minoritas kritis (critical minority) yang terdiri dari 30% atau 40% dan diterapkan sebagai tindakan temporer (tindakan sementara) sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dalam ranah politik dapat disingkirkan. Menurut Azza Karam ada beberapa hal yang menyebabkan sistem kuota ini muncul yaitu karena ide inti dari sistem kuota ini untuk merekrut perempuan masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik. Sistem kuota ini bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan, karena problem yang menghambat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan, padahal pemilih perempuan sangat mayoritas. Selain itu, sistem kuota perlu dibentuk menjadi sebuah konstruksi gender yang baru untuk mengoreksi konstruksi gender yang lama serta mengoreksi keseimbangan perwakilan antara perempuan dan laki-laki atau sering disebut dengan tindakan netral terhadap gender.

Perlu diketahui, kuota juga sebenarnya dapat membantu laki-laki untuk menggunakan sistem kuota ini dalam posisi khusus disektor-sektor dimana perwakilan perempuan sangat besar. Oleh karena itu, pemahaman kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengaplikasikan sistem kuota ini. Penjelasan tersebut diatas mewakili mengapa kebijakan affirmative action ini penting bagi keterwakilan perempuan. Keuntungan dari implementasi kebijakan affirmative action antara lain adalah menekan lembaga-lembaga yang mencalonkan perempuan, terutama partai politik untuk mengikutsertakan perempuan dalam

suatu proses rekrutmen yang aktif.

Sistem kuota ini diyakini sangat efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Dalam pandangan Carolina Rodriguez (2003) kuota menjadi penting karena telah meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan baik dalam proses pemilihan umum maupun posisi pengambil keputusan. Lebih dari 77 negara yang menggunakan kuota dalam konstitusinya ataupun melalui proses pemilihan maupun dalam posisi pengambil kebijakan berpengaruh terhadap dimasukkannya agenda perempuan sebagai prioritas. Kuota perempuan dalam politik memungkinkan adanya perubahan posisi peran dan kapasitas perempuan karena perempuan memperoleh peluang pendidikan, pekerjaan dan peluang lainnya.

Bahwa jelas dalam beberapa konsensus bahwa kuota gender adalah cara yang paling efektif untuk membuka peluang perempuan dan memastikan kehadiran perempuan dalam struktur politik formal. Kita perlu menyetujui adanya kebijakan affirmative action karena beberapa faktor yaitu karena perempuan mempresentasikan setengah dari penduduk yang mempunyai hak sebagai warga negara atas setengah kursi di DPR, oleh karena itu kuota untuk perempuan bukanlah tindakan diskriminasi, tetapi sebuah kompensasi atas rintangan yang 22 selama ini menghalangi perempuan terlibat dalam politik formal (karena alasan keadilan).

Selain itu perempuan mempunyai pengalaman berbeda baik dari segi biologis maupun konstruksi sosial sehingga mereka harus memiliki wakilnya dari kaumnya sendiri di parlemen. Terlebihnya keberadaan politisi perempuan dapat menjadi inspirasi pula bagi perempuan lainnya untuk terlibat dan berperan dalam dunia politik. Bagaimanapun pemilihan adalah tentang keterwakilan, bukan semata-mata karena kualifikasi pendidikan. Nyatanya banyak perempuan

mempunyai kulit sama dengan laki-laki, tetapi kulit perempuan dinilai rendah dan menjadi tidak berguna dalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki.

Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan perempuan yang jauh dibelakangnya laki-laki dalam akses politik, maka kebijakan affirmative action akan terjadi persamaan peluang, kualitas, peran dan sebagai wujud toleransi atas perbedaan akses politik bagi perempuan.<sup>4</sup> Affirmative action terbagi menjadi 3 yaitu:

1. 30% Kuota perempuan dalam kepengurusan partai khusus ditingkat nasional (Dewan Pimpinan Pusat)
2. 30% kuota perempuan dalam pencalonan legislatif
3. 30% kuota perempuan dalam keterwakilan di lembaga legislatif

#### 2.2.4. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik perempuan merupakan keterlibatan perempuan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka sendiri sebagai perempuan. Di Indonesia, partisipasi politik perempuan merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan. Aspek partisipasi perempuan dalam demokrasi bukanlah suatu yang datang dengan tiba-tiba melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat kita. Namun sayangnya kondisi partisipasi perempuan di panggung politik masih sangat rendah, dimana sistem politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki sehingga dengan sendirinya bila diberlakukan kondisi alamiah, maka panggung politik akan tetap didominasi secara mayoritas oleh laki-laki.

Oleh karena itu, saat ini partisipasi politik perempuan semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan mengupayakan instrument hukum yang sensitive gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan diberbagai sektor kehidupan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui **Pengaruh Modal Sosial Terhadap Strategi Politik Dalam Pemenangan Darwati A Gani**. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>28</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Pengaruh Modal Sosial Terhadap Strategi Politik Dalam Pemennagan Darwati A. Gani

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan Kota Banda Aceh dengan pertimbangan Kota Banda Aceh merupakan salah satu dapil yang memenangkan Darwati A Gani.

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah:

- Data primer, yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian *Pandangan Masyarakat Terhadap Kemenangan Politik Perempuan Darwati A Gani Sebagai Anggota DPRA Dapil I Di Kota Banda Aceh.*

### 3.5. Informan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian tentunya untuk mendapatkan data dibutuhkan informan penelitian. Demikian pula dalam penelitian ini informan penelitian sebagai berikut:

No	Informan	Jumlah
1	Masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar	3 Orang

2	Tim Pemenangan Darwati A Gani di Kota Banda Aceh	2 orang
Jumlah		5 Orang

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.<sup>30</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).<sup>31</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, hal.165

<sup>31</sup> Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

<sup>32</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- **Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data adalah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

- **Penyajian Data**

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- **Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi**

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat

penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Darwati A Gani**

Darwati A. Gani, perempuan kelahiran Bireuen, 7 September 1973 adalah istri mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang juga Ketua Umum dari Yayasan Sambinoe yang memiliki program pendidikan dan pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat kurang mampu. Sebagai Ketua Tim penggerak PKK dan Dekranasda NAD, dirinya bersama pengurus di setiap daerah berusaha mewujudkan program-program pokok yang dicanangkan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh.

Darwati A Gani juga merupakan anggota DPRA selama 2 periode. Namun di periode pertama beliau mengundurkan diri karena suaminya menjabat sebagai Gubernur Aceh. Darwati A Gani adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2019-2024 Darwati A Gani lahir di Bireuen, pada 7 September 1973.<sup>33</sup> Menghabiskan masa kecilnya di Bireuen, dan menyelesaikan Sekolah Dasar hingga sampai Sekolah Menengah Atas di kabupaten tersebut. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan ke Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dengan mengambil jurusan PDPK Fakultas Ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Acehpedia.org diakses pada 18 juni 2022

<sup>34</sup> Acehpedia.org diakses pada 18 juni 2022



Gambar 4.1. Instagram Darwati A Gani anggota DPR Aceh

Darwati dalam kesehariannya juga menjadi Ketua Umum dari Yayasan Sambinoe yang memiliki program pendidikan dan pembinaan serta pemberdayaan untuk masyarakat kurang mampu. Kegiatan sosial ini sudah dilakukan semenjak suaminya menjabat periode pertama sebagai Gubernur Aceh.

Secara politik Darwati A Gani bukan orang baru dalam perpolitikan Aceh. Darwati A Gani mulai aktif pada saat terlibat dalam kemenangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, pada saat itu Irwandi yang merupakan suami dari Darwati A Gani maju pertama kali menjadi calon gubernur. Setelah suaminya memenangkan pertarungan orang nomor satu di provinsi Aceh, Darwati A Gani terus aktif mendampingi suami dalam bertugas. Dengan waktu bersamaan progress dan cikal bakal politik Darwati A Gani terbentuk.

Darwati A Gani terpilih sebagai anggota DPR Aceh pada periode tahun 2014/2019 namun mundur separuh waktu dengan beberapa alasan pribadi,

dicurigai karena terpilihnya Irwandi sebagai gubernur Aceh periode 2017/2012 . pada periode pertama darwati A Gani mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang cukup banyak sejumlah 7.036 Pemilih Kemudian pada pemilihan legislatif tahun 2019 kembali menjadi salah satu bakal calon legislatif dari partai PNA. Pada pemilihan tahun 2019 Darwati A Gani Kembali terpilih sebagai anggota DPRA dapil 1 untuk bertugas sebagai wakil rakyat untuk periode 2019-2024 dengan 6.758 Pemilih. Jadi bisa disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Darwati A Gani menurun.

#### **4.2. Modal Sosial dalam Pemenangan Darwati A Gani**

Modal sosial sebagai kumpulan sejumlah sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi, yang sedikit banyak telah terlembaga dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa.<sup>35</sup>

John F. Halliwell dalam bukunya *Social Capital and Prosocial Behaviour Sources of Well-Being* mengkaji klaim-klaim empirik tentang pentingnya modal sosial diantaranya:

1. Modal sosial selalu penting untuk pengembangan kapital manusia.
2. Modal sosial dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan memberi kebahagiaan yang subyektif.

---

<sup>35</sup> Bourdieu, Pierre, and Wacquant, Loic J. D. (1992), *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago

3. Modal sosial juga juga dianggap penting peranannya guna meminimalisir ongkos dan resiko yang mungkin dikeluarkan dalam kegiatan ekonomi. Keempat, modal sosial dapat menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal.<sup>36</sup>

Pierre Bourdieu yang dikutip Oleh Purwanto menjelaskan tentang konsep modal sosial sebagai sumberdaya aktual dan potensial yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan hubungan perkenalan dan pengakuan yang terlembaga dan awet atau dengan kata lain, pada keanggotan seorang aktor dalam suatu kelompok yang memberikan hak pada tiap anggotanya dukungan modal yang dimiliki secara kolektif, 'kepercayaan' yang memungkinkannya mendapatkan kredit dalam berbagai pengertian kata.

Modal sosial yang berupa organisasi sosial, kekerabatan dan keterikatan antara aktor dan masyarakat disekitarnya lebih memudahkan dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena sudah lama saling mengenal dan ada hubungan timbal balik. Terakumulasinya semua modal baik itu oleh jaringan sosial, kepercayaan pada aktor serta hubungan timbal balik dapat memberikan dukungan di berbagai bidang dalam arena politik aktor. Jalinan hubungan yang baik itu terus dibina secara berkelanjutan. Aktor yang telah lama membangun jalinan pertemanan dengan masyarakat memiliki pengaruh dan kedekatan khusus pada masyarakat. Menyadari pentingnya modal Sosial dalam upaya pemenangan Darwati A Gani sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada

---

<sup>36</sup> F. Helliwell, University of British Columbia; Lara B. Akinin, Simon Fraser University; Hugh Shiplett, University of British Columbia;

tahun 2019. Untuk menjadi politisi modal sosial adalah sesuatu yang fundamentalis yang harus dimiliki oleh calon. Menyikapi mengenai modal sosial untuk Darwati A Gani tidak begitu sulit. Sebab, sejak kemunculan darwati A Gani di kancah politik provinsi Aceh sudah di didukung oleh popularitas suaminya yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Aceh. Hal itu tentunya memudahkan Darwati A Gani untuk tampil ke ruang public dan memilih menjadi politisi.

#### 4.2.1. Relasi Keluarga/ Jalur kekerabatan

Keluarga merupakan lembaga pertama yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kehidupannya, dari keluarga setiap manusia akan mulai membentuk diri mereka sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga pula setiap manusia akan di gembleng sebelum akhirnya nanti terjun secara langsung dalam masyarakat.

Menurut Hartono, keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam kadar waktu yang lama dengan tujuan untuk memiliki keturunan. Keluarga sendiri terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum memasuki usia dewasa.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Mattessich dan Hill, keluarga adalah kelompok yang tercipta karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat, tempat tinggal yang sama dan memiliki hubungan emosional yang dekat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Syamsul Ma'arif, "Konsep Al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia," (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2010), 7.

<sup>38</sup> Heroine Puspitawati, Konsep dan Teori Keluarga, 2013 [Karya Ilmiah on-line]; tersedia di <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf>; Internet; diunduh pada Sabtu 9 juli 2022 pukul: 17.38 WIB.

Darwati A Gani perempuan kelahiran Bireun ini dalam keterlibatannya sebagai aktor politik dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yang dapat menunjang karir politiknya. Salah satu factor yang sangat mempengaruhi karir politik adalah factor keluarga. Darwati A Gani menyadari hal ini, selama menjadi aktor politik karir Darwati dipengaruhi oleh Irwandi Yusuf yang merupakan suami dari Darwati itu sendiri. Irwandi Yusuf merupakan politisi senior di Aceh. Irwandi pernah menjabat sebagai gubernur Aceh dua periode yaitu periode 2007-2012 dan periode 2019-2022.

Posisi ini jelas menjadi keuntungan untuk Darwati dalam mengepakkan sayap politiknya di provinsi Aceh. Hal ini disampaikan oleh Tim Pemenangan Darwati A Gani saat peneliti wawancarai, mengatakan:

*“Sangat pasti, karena masyarakat aceh masih mengingat sejarah Irwandi yang telah memperjuangkan kesehatan bagi masyarakat”<sup>39</sup>*

Selain itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Aceh mengenal Darwati A Gani karena sosok irwandi Yusuf. Karena memang pada masa Irwandi Yusuf sebagai gubernur pada periode Pertama terpilih tahun 2007-2012 irwandi mampu memperjuangkan kesehatan dan juga kemauan rakyat Aceh. Sehingga nama Irwandi Yusuf terkenal ke seluruh Aceh. Dengan Demikian Darwati A Gani yang kala itu menjadi Ibu PKK Provinsi tentunya terlibat langsung dalam mendampingi suami bertugas sampai ke pelosok Aceh. Darwati A Gani dapat berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, banyak menemani Irwandi dalam kunjungan-kunjungan dinas, dan sebagai ibu PKK. Hal tersebut disampaikan oleh Informan yang merupakan masyarakat yang berhasil peneliti wawancarai:

*“posisi suami yang merupakan gubernur Aceh, memungkinkan Ibu Darwati lebih dikenal oleh khalayak, karena posisi bu darwati sebagai Ibu nomor satu Di Aceh hal itu yang membuat beliau dikenal banyak oleh masyarakat.”<sup>40</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh Irwandi Yusuf dalam karir politik Darwati A Gani sangat dominan. Bahkan masyarakat mengenal sosok Darwati A Gani pertama kali karena merupakan istri orang Nomor satu di provinsi Aceh. Keikutsertaan Darwati A Gani dalam agenda kerja Irwandi dengan sendirinya masyarakat mengenal sosok Darwati. Apalagi ditambah dengan sosok dan pembawaan dan keramah tamahan Darwati yang khas membuat tidak begitu sulit untuk membranding dirinya. Sehingga kebanyakan dari partisipan yang memilih Irwandi akan mengenal Darwati.

Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya membranding diri Darwati A Gani sangat dibantu oleh faktor keluarga terutama dukungan dari suami dan juga popularitas suami Darwati dapat menunjang karir politik Darwati A Gani.

Tidak bisa dipungkiri bahwa muncul Nama Darwati A Gani ke Publik dikarenakan Darwati Adalah istri dari mantan Gubernur Aceh yang memenangkan dua periode pemilihan Gubernur di provinsi Aceh. Masyarakat mulai mengenal Darwati adalah saat Irwandi Yusuf menjabat Gubernur pada periode pertama 2007-2012. Hal ini disampaikan kepada peneliti oleh informan dalam wawancara, mengatakan;

*“Saya mengenal Buk Darwati Sejak ibu darwati menjadi ibu gubernur sejak periode pertama kali. Karena memang sering melihat Pak Irwandi bersama dengan Buk Darwati.”<sup>41</sup>*

Alasan masyarakat percaya kepada Darwati A Gani karena ada harapan besar yang diberikan oleh masyarakat untuk dapat juga membangun Aceh sebagaimana sudah pernah dilakukan oleh Suaminya. Salah satu informan peneliti menyampaikan:

*“Kak Dar (Darwati A Gani) sangat diuntungkan karena merupakan istri dari tokoh politik senior yang sudah banyak*

*membangun Aceh yaitu bang Wandu (Irwandi Yusuf) Sangat pasti, karena masyarakat aceh masih mengingat sejarah Irwandi yang telah memperjuangkan kesehatan bagi masyarakat. (Bang Wandu di Drop Nyan Ken politek Nasional Agai).<sup>42</sup>*

Kasus OTT Irwandi tidak mempengaruhi sebagian besar pendukungnya, karena masyarakat masih mengenang kejayaan Irwandi (biaya kesehatan gratis, perjuangan masyarakat Aceh), serta kinerja-kinerja yang dilakukan Darwati. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

*“Tidak berpengaruh, karena didalam politik yang dilihat selalu kinerjanya, ditambah lagi masyarakat aceh ini keseringan mengklaim tentang perjuangan bagi Aceh.”<sup>43</sup>*

Sebagaimana keterangan wawancara diatas dapat kita lihat masih banyak masyarakat Aceh yang menganggap bahwa kasus OTT Irwandi adalah semata mata karena politis saja. Maka dari itu OTT Irwandi tidak berpengaruh banyak kepada keterpilihan masyarakat terhadap Darwati A Gani pada pemilihan legislatif tahun 2019. Karena memang masyarakat masih mengenang kebaikan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak M. Nasir salah seorang warga Bireuen yang menetap di Banda Aceh, pada 21 juni 2022

<sup>42</sup> Wawancara dengan T Safrizal warga gampong Cadek, kecamatan Baitussalam Aceh Besar

<sup>43</sup> Wawancara dengan Tim Pemenangan Darwata Kak Asiyah warga Gampong Emperom

yang dilakukan Irwandi pada saat menjadi Gubernur terutama pada periode pertama tahun 2007-2012. Seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang memberikan layanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Aceh.

#### 4.2.2 Relasi Sosial Komunitas

Banyak masyarakat mulai mengenal Darwati sejak ia menjadi ibu PKK dan selalu mendampingi Gubernur Irwandi Yusuf bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Hal tersebut pula yang membuat sosok Darwati A Gani dikenal dengan cepat oleh masyarakat Aceh. Kemudian memudahkan Darwati A Gani dalam mencari simpatisan saat memutuskan maju sebagai anggota legislatif perempuan DPRA.

Setelah itu, baru beliau banyak berkecimpung dalam komunitas seperti komunitas anti narkoba. Sebagaimana salah satu informan dalam penelitian ini mengungkapkan:

*“Beliau banyak bergabung dalam berbagai organisasi, tetapi beliau mudah dikenal oleh masyarakat dalam kegiatan yang beliau hadiri seperti anti narkoba”<sup>44</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Darwati A Gani digambarkan sebagai sosok yang peduli terhadap masa depan masyarakat terutama anak muda. Oleh karena itu beliau tergabung dalam berbagai komunitas baik komunitas hobi maupun komunitas filantropi. Hal ini sebagaimana yang tergambar dari postingan-postingannya di bawah ini:

---

<sup>44</sup> Wawancara Dengan, Irawati (38) Masyarakat Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,



*Gambar 4.2 Darwati berkampanye anti narkoba Tahun 2018*

#### 4.2.3 Relasi dengan Masyarakat

Darwati A Gani membangun kedekatan yang baik dengan masyarakat dan dipandang sebagai sosok yang ramah dan berjiwa social bahkan semenjak periode pertama Irwadi menjadi Gubernur, rumah Darwati terbuka lebar untuk masyarakat terutama pada hari hari besar seperti hari Raya Idul fitri. Hal ini juga menjadi salah satu alasan Darwati A Gani dekat dengan masyarakat karena memang kedermawanannya.

Selain dari pada itu untuk membangun relasi dengan masyarakat, Darwati A Gani juga turun langsung dan menghadiri undangan dari masyarakat jika beliau memiliki waktu luang pasti menyempatkan menghadiri undangan masyarakat. Selain dari undangan pesta, Darwati A Gani juga ikut menghadiri undangan peringatan hari-hari besar, menghadiri seminar. Darwati A Gani juga sering melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui aksi turun langsungnya ketika masyarakat mengalami musibah, seperti gambar dibawah ini yang merupakan postingan Instagram Darwati A Gani:



*Gambar 4.4 Kegiatan Donasi untuk konbar banjir tahun 2018*



*Gambar 4.5 Darwati mengadakan bazar buku pada tahun 2018*

Dalam keterangan foto yang diunggah Darwati A Gani di dalam instagram pribadinya menjelaskan bahwa Darwati dalam sela-sela perjalanannya jika diminta untuk mampir di suatu acara tidak akan menolak, dengan sifat ini pula sosok Darwati mudah dikenal masyarakat. Kemudian Darwati A Gani juga akan

merespon komentar yang ada di laman postingan Instagramnya seperti yang tertera dalam gambar di atas. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa dekat masyarakat dengan Darwati A Gani.

### 4.3. Strategi Politik dalam Pemenangan Darwati A Gani

Strategi politik seringkali digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan politik, terutama pada saat pemilihan umum. Strategi politik yang dilakukan berkaitan dengan strategi kampanye dimana memiliki tujuan untuk memperoleh hasil suara yang maksimal di pemilu agar memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat. Menurut Michael Alison dan Jude Kaye:

*“Strategi adalah proses sistematis yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan di antara stakeholder utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi”<sup>43</sup>*

Strategi politik adalah sebuah rencana yang sistematis dan mengimplementasikannya untuk mencapai tujuan dalam memenangkan kontes di bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan kekuasaan. Menurut Baihaqi:

*“Strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan.”<sup>45</sup>*

Berdasarkan pendapat diatas, strategi politik diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu. Dengan strategi politik ilmiah yang baik dan tepat partai politik mampu memenangkan dalam setiap momentum perebutan

kekuasaan. Maka dari itu setiap partai politik yang berkompetisi pada pemilihan umum harus menyiapkan strategi politik dengan sebaik mungkin.

#### 4.3.1. Strategi Ofensif Darwati A Gani

Strategi ofensif merupakan strategi yang digunakan dalam strategi politik yang bertujuan untuk mencari pemilih baru dan memperluas pangsa pasar dalam pemilihan umum. Strategi ofensif digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah pemilihnya, strategi yang digunakan yaitu dengan memberikan inovasi program baru seperti mengangkat isu-isu kekinian misalnya kekerasan seksual, kesehatan perempuan, dan perlindungan anak yang tujuannya adalah untuk menggaet pemilih perempuan dan pemula yang mana nantinya akan memberikan keuntungan terhadap pemilih.<sup>46</sup>



---

<sup>45</sup> Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)

<sup>46</sup> Schröder, Peter. 2004. *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung



Gambar 4.7 Flayer Darwati mengisi acara isu kekerasan



Gambar 4.8 Darwati sedang diskusi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait kerja-kerja perlindungan anak

Selain itu, Darwati A Gani melakukan pendekatan kepada pemilih yang memang sulit dijangkau oleh calon lainnya. Dengan strategi ini menempatkan nama Darwati A Gani sebagai calon kepercayaan masyarakat. Strategi ini disusun oleh tim pemenangan supaya dapat menjaring pemilih yang beragam dari seluruh daerah pemilihan, sebagaimana dalam wawancara tim pemenangan Darwati A Gani sampaikan sebagai berikut:

*“Ibu Darwati melakukan program di mana daerah atau tempat yang sulit untuk dijangkau oleh lawan politiknya dengan cara peduli pada*

*daerah daerah yang didatanginya daerah tersebut kebanyakan belum di datangi oleh lawan politiknya”<sup>47</sup>*

Dari wawancara di atas dapat kita lihat bahwa strategi untuk menemukan dan mendapatkan kepercayaan kepada pemilih dengan datang langsung ke lokasi yang memang belum didatangi oleh calon lainnya.

#### 4.3.2. Strategi Defensif Darwati A Gani

Strategi defensif dilakukan apabila partai politik, actor politik ingin mempertahankan mayoritasnya atau pemilih yang ingin dipertahankan.<sup>48</sup> Strategi defensive perlu dipersiapkan dengan matang baik oleh calon maupun oleh tim pemenangan.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019 pemilih Darwati A Gani dari bermacam kalangan, tapi paling banyak dari kalangan tua dengan alasan mengagumi Irwandi sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*“Pak Irwandi melakukan banyak hal untuk aceh karena itu masyarakat aceh masih mengingat sejarah Irwandi yang telah memperjuangkan kesehatan bagi masyarakat”<sup>49</sup>*

Sebagaimana hasil wawancara diatas bahwa kepercayaan dari masyarakat yang belum mengenal Darwati A Gani dengan baik. Pasti akan berkaca pada kinerja yang baik yang sempat dilakukan oleh suaminya terutama pada saat menjabat gubernur Aceh periode 2007-2012 yang selalu memperjuangkan hak masyarakat seperti kesehatan yang sampai hari ini terobosan Jaminan Kesehatan Aceh masih dikenal dan diingat oleh masyarakat Aceh. JKA dalam ingatan

---

<sup>48</sup> Schröder, Peter. 2004. Strategi Politik, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung

<sup>49</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kota Banda Aceh Cut Riska Ramazaniar pada 25 Juni 2022

masyarakat Aceh adalah salah satu kesuksesan Irwandi yang juga bisa dilakukan oleh Darwati A Gani.

Setelah mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk yakin memilih Darwati A Gani. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah terus mengingatkan kepada masyarakat bagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Irwandi akan diteruskan oleh Darwati A Gani. Perjuangan suara-suara rakyat dan juga pemenuhan hak terhadap masyarakat akan terus dilakukan oleh Darwati A Gani, bahkan sampai sekarang upaya itu dilakukan. Dalam tindakan lapangan dan juga implementasi terhadap apa yang sudah pernah dijanjikan saat kampanye terus di wujudkan. Misalnya dengan meneruskan program-program Irwandi seperti memberikan modal usaha, sebagaimana strategi yang juga dulu diterapkan oleh Irwandi Yusuf, sebagaimana keterangan dalam wawancara sebagai berikut;

*“Karena saya percaya bahwa bu darwati bisa memperjuangkan suara rakyat sebagaimana yang telah dilakukan oleh suaminya, dan khususnya saya yakin bahwa bu darwati bisa mewakili suara- suara perempuan di aceh terhadap hak nya”<sup>50</sup>*

Darwati A Gani memfokuskan diri pada isu gender misalnya aktif dalam mengajak para perempuan di Aceh untuk lebih peduli terhadap kesehatan payudara lewat pemeriksaan rutin atau pendeteksian dini atas penyakit kanker payudara. Hal itu didasari dari banyaknya perempuan yang menderita penyakit tersebut.<sup>51</sup> Darwati juga Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Aceh,

---

<sup>50</sup>Wawancara Dengan, Irawati (38) Masyarakat Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,

<sup>51</sup><https://infopublik.id/kategori/nusantara/300325/darwati-ajak-perempuan-deteksi-dini-kanker-payudara?show=#> diakses pada 17 juni 2022

sebagaimana gambar dibawah ini Darwati aktif turun kejalan untuk mengkampanyekan pentingnya mendeteksi kanker payudara untuk perempuan.

Dari pembahasan di atas dapat kita ambil benang merah sebagai ikhtisar bahwa modal sosial memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pemenangan Darwati A Gani pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2019, terutama dalam kaitannya dengan relasi keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sebagaimana karya ilmiah lainnya setiap karya ilmiah terdapat kesimpulan atau ikhtisar dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam penelitian dengan judul Pengaruh Modal Sosial Terhadap Strategi Politik Dalam Pemenangan Darwati A Gani pada pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah sebagai berikut:

1. Modal sosial dalam karir politik sangat berpengaruh dalam menunjang simpati masyarakat dan juga menjadi aset awal membangun eksistensi dalam mencapai elektabilitas. Darwati A Gani dalam mencapai kemenangan pada pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2019 didukung oleh modal sosial sebagai berikut:

- **Relasi Keluarga**

Salah satu factor yang sangat mempengaruhi karir politik adalah factor keluarga. Darwati A Gani menyadari hal ini, selama menjadi aktor politik karir Darwati dipengaruhi oleh Irwandi Yusuf yang merupakan suami dari Darwati itu sendiri. Irwandi Yusuf merupakan politisi senior di Aceh. Irwandi pernah menjabat sebagai gubernur Aceh dua periode yaitu periode 2007-2012 dan periode 2019-2022. Maka Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya membranding diri Darwati A Gani sangat dibantu oleh faktor keluarga terutama dukungan dari suami dan juga popularitas suami Darwati dapat menunjang karir politik Darwati A Gani.

- Relasi dengan Masyarakat

Darwati senantiasa aktif dalam membantu masyarakat saat tertimpa musibah, seperti musibah banjir, kebakaran dan lainnya Darwati tidak segan untuk berkunjung dan memberikan bantuan. Hal ini mampu menumbuhkan simpatisan masyarakat.

- Relasi Sosial Komunitas

Darwati sangat aktif dalam komunitas sehingga dengan berkecimpung dalam komunitas-komunitas seperti komunitas sepeda dapat membantu mendekatkan diri secara mendalam kepada masyarakat komunitas. Beliau banyak berkecimpung dalam komunitas-komunitas filantropi seperti peduli kanker, peduli kaum dhuafa, anak yatim dan janda.

2. Dalam melakukan branding diri Darwati A Gani dalam upaya memperoleh kemenangan pada pemilihan Legislatif Tahun 2019 menggunakan dua Strategi utama yaitu:

- a. Strategi Ofensif

Dalam strategi ini Darwati melakukan pendekatan, dengan memberikan inovasi program baru seperti mengangkat isu-isu kekinian misalnya kekerasan seksual dan perlindungan anak yang tujuannya adalah untuk menggaet pemilih perempuan dan pemula yang mana nantinya akan memberikan keuntungan terhadap pemilih.

- b. Strategi Defensif

Pada strategi ini Darwati mencoba mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan meneruskan program-program Irwandi seperti memberikan modal usaha, sebagaimana strategi yang juga dulu diterapkan oleh Irwandi Yusuf. Kemudian memfokuskan diri pada isu gender misalnya

aktif dalam mengajak para perempuan di Aceh untuk lebih peduli terhadap kesehatan payudara lewat pemeriksaan rutin atau pendeteksian dini atas penyakit kanker payudara. Darwati juga merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Aceh.

## 5.2. Saran

Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti sadari masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu masukan dan kritik membangun sangat peneliti harapkan. semoga karya ilmiah ini dapat menjadi referensi dan berdaya guna untuk peneliti khususnya dan khalayak ramai pada umumnya. Untuk peneliti selanjutnya semoga karya ilmiah ini dapat membantu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Hill, dan Turner dalam Sukmana Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Almond dalam Hijri S Yana. 2016. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Basri Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schroder, Peter. 2008. *Strategi Politik Indonesia*. Jakarta: Friedrich-Naumann
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003
- Hidajat Imam. 2009. *Teori-Teori politik*. Malang: Setara press.
- Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurrahman. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Liza Hadis. *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta. Penerbit Pustaka LP3ES. Indonesia. 2004.
- Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi (Cetakan kedua). Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Siti Musdah Mulia & Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. PT gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Edisi Baru (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993).
- Michael Allison, dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), [http://www.academia.edu/32993954/Metode Penelitian kualitatif](http://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif)

Sunaryo, Bambang *Nilai Penting Konsep Affirmative Action Policy Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Aparatur Berbasis Merit* Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 8, No.1, Juni 2014.

